

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk di suatu negara. Untuk negara Indonesia salah satu sasaran pembangunan nasional adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan (Walida Mustamin & Undai Nurbayani, 2015).

Kemiskinan merupakan keadaan di mana ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, Kesehatan, dan pendidikan. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan di berbagai negara. Namun di negara yang sudah maju saja pada umumnya memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan di negara berkembang. Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dalam suatu negara karena dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran).

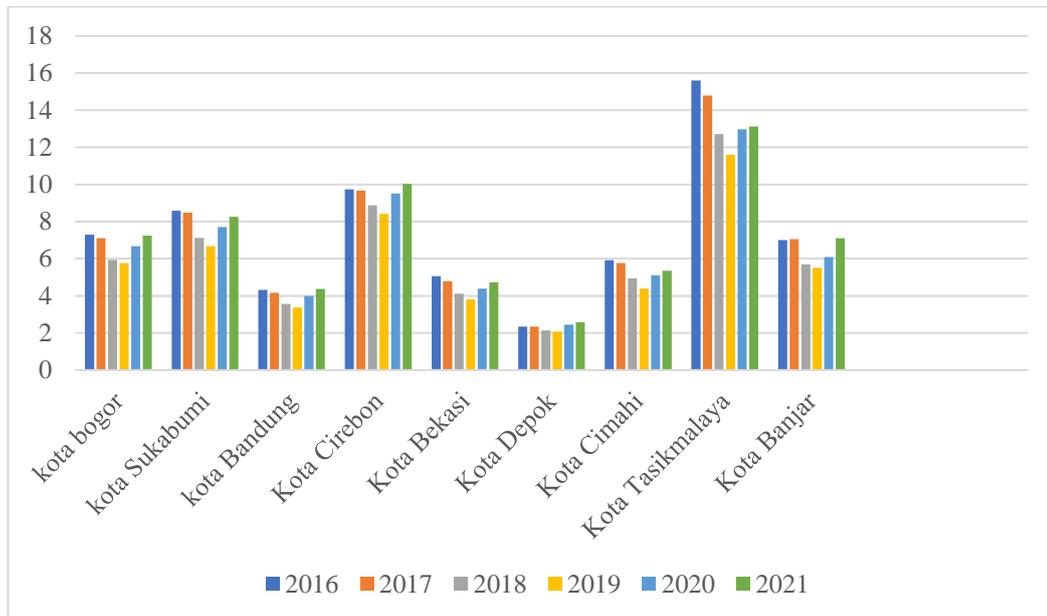
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Sebagai negara berkembang di negara tersebut masih memiliki warga yang hidup dalam garis kemiskinan atau di bawah garis kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan baik pemerintah pusat maupun daerah telah melaksanakan

berbagai kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan, namun masih jauh dari optimal.

Kesejahteraan masyarakat di suatu negara dapat dicerminkan dari tingkat kemiskinan di suatu negara. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia berkurang 1,04 juta jiwa menjadi 26,5 juta jiwa pada September 2021 dibanding Maret 2021. Jika dibandingkan dengan data pada bulan September 2020, jumlah penduduk miskin juga berkurang 1,05 juta jiwa.

Kemiskinan makro dapat digunakan untuk menggambarkan kemiskinan di suatu daerah serta membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah sehingga pemerintah bisa mengambil kebijakan untuk mengatasi kemiskinan tersebut dan juga bisa evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan (Rizkiyah & Nuryati, 2020).

Pada tahun 2019 kemiskinan di Jawa Barat berada di angka 6,91 persen. Angka ini kemudian bertambah seiring adanya pandemik COVID-19 dan naik menjadi 8,40 persen pada tahun 2021. Faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan ekstrem yaitu salah satunya tingkat pendapatan rumah tangga sangat rendah. Pemerintahan Jawa Barat menyebut perlu adanya upaya konkret dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di daerah.



Gambar 1. 1 Persentase Penduduk Miskin Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021 (%)

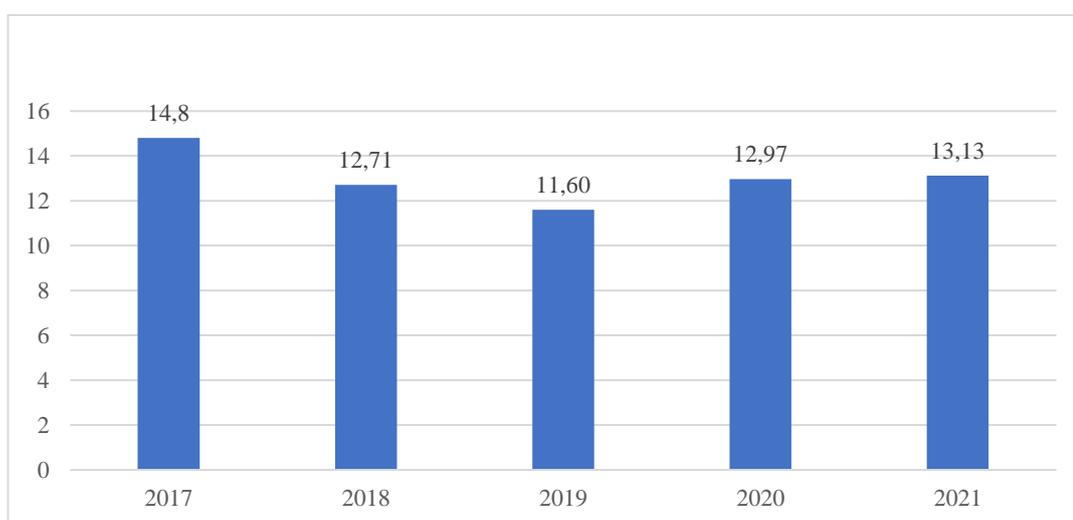
Sumber: Badan Pusat Statistik

Kota Depok memiliki persentase penduduk miskin terendah di Jawa Barat dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2016 yakni sebesar 2,34 persen. Pemerintah Kota Depok melalui Bappeda setempat memiliki sejumlah strategi untuk menanggulangi angka kemiskinan di wilayahnya. Beberapa program yang sudah ditetapkan adalah 5.000 wirausaha baru (*start up*), 1.000 perempuan pengusaha, Kartu Depok Sejahtera (KDS), serta menyelesaikan ketidaksesuaian antara angkatan kerja (lulusan) dengan dunia kerja.

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa Kota Tasikmalaya merupakan kota yang angka kemiskinannya paling tinggi jika dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2016 Kota Tasikmalaya memiliki persentase penduduk miskin tertinggi yaitu sebesar 15,60 persen, lalu diikuti oleh

Kota Cirebon yang merupakan peringkat kedua kota miskin di Jawa Barat dengan persentase penduduk miskin sebesar 9,73 persen.

Penyebab Kota Tasikmalaya menjadi kota termiskin di Jawa Barat yaitu, tidak ada keberpihakan dari sisi anggaran. Dimana alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan tidak menjadi prioritas (Nandang, 2021).



Gambar 1. 2 Persentase Penduduk Miskin Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Data di atas merupakan data persentase penduduk miskin di Kota Tasikmalaya dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin Kota Tasikmalaya sebesar 14,80 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 97,85 ribu jiwa. Dari tahun 2017-2021 persentase penduduk miskin terendah berada pada tahun 2019 sebesar 11,60 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 76,98 ribu jiwa.

Sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 terjadi kenaikan kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Peningkatan kemiskinan ini masih dipengaruhi oleh efek pandemi

Covid-19. Hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat produktivitas baik individu maupun perusahaan sehingga mendorong munculnya orang miskin baru yang secara agregat meningkatkan jumlah penduduk miskin (Open Data, 2022).

Menurut Wardis Girsang (2016), selama ini pertumbuhan ekonomi dianggap menjadi tujuan pembangunan. Kenyataannya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kekayaan sumber daya alam melimpah tidak menjadi jaminan rendahnya angka kemiskinan. Hal penting adalah bahwa kemiskinan tidak mudah diturunkan dalam waktu singkat karena pengalaman kecepatan menurunkan kemiskinan di berbagai negara umumnya kurang dari 2% per tahun. Maka penurunan jumlah penduduk miskin tidak bisa instan tetapi terencana, gradual dan berkelanjutan dan memerlukan kerjasama di berbagai jenjang, mulai dari tingkat lokal, nasional, regional maupun global.

Menurut Swendra et al., (2016), mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan masalah-masalah yang lain secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor dan lintas pelaku secara terpadu, terkoordinasi, dan terintegrasi.

Laju penurunan jumlah penduduk miskin merupakan salah satu indikator utama keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi. Namun kemiskinan masih tetap menjadi masalah yang sulit dihindari. Pemerintahan baik di daerah maupun pusat telah mengupayakan dan melaksanakan berbagai program dalam penanggulangan kemiskinan.

Produk domestik regional bruto (PDRB), tingkat pendidikan dan pengangguran merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Adapun faktor lain yang memiliki kedudukan penting dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan yaitu lembaga keuangan bank perkreditan rakyat (BPR).

Bank sebagai lembaga keuangan merupakan institusi yang berperan penting dalam menopang kegiatan perekonomian masyarakat terutama sektor riil. Sektor riil merupakan sektor produksi yang menghasilkan produk (barang maupun jasa) yang secara langsung akan menggerakkan roda perekonomian masyarakat di suatu wilayah. Seluruh komponen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan perekonomian, khususnya pelaku kegiatan produksi, memerlukan peran aktif industri perbankan akan memberikan kontribusi positif berupa jasa pembiayaan (kredit) terhadap kegiatan-kegiatan produktif masyarakat (Budiyanti, 2018).

Tabel 1. 1 Kredit yang Disalurkan BPR di Kota Tasikmalaya (Triliun Rupiah)

| Tahun | Bank | | | | | Jumlah |
|-------|----------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------|-------------|
| | BPR Artha Galunggung | BPR Siliwangi | BPR Artha Jaya Mandiri | BPR Banjar Arthasariguna | BPR Pola Dana | |
| 2017 | 125.575.698 | 16.409.601 | 10.521.667 | 15.805.319 | 16.727.354 | 185.039.639 |
| 2018 | 139.470.184 | 20.777.468 | 12.690.221 | 12.157.061 | 16.117.939 | 201.212.873 |
| 2019 | 167.710.089 | 24.815.049 | 14.085.124 | 10.423.809 | 17.398.458 | 234.432.529 |
| 2020 | 151.874.499 | 25.515.548 | 15.004.299 | 12.345.041 | 12.554.174 | 217.293.561 |
| 2021 | 209.858.482 | 46.905.721 | 16.972.403 | 15.123.762 | 15.115.712 | 303.976.080 |

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya kredit yang disalurkan BPR cenderung meningkat. BPR Artha Galunggung merupakan bank yang menyalurkan kredit paling banyak dibandingkan bank yang lain. Menurut penelitian sebelumnya semakin tinggi kredit BPR yang diberikan atau disalurkan

maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. Bank perkreditan rakyat (BPR) memiliki fungsi utama untuk menjalankan fungsi intermediasi atau perantara keuangan. Mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat. Baik dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya untuk mendorong kegiatan usaha masyarakat.

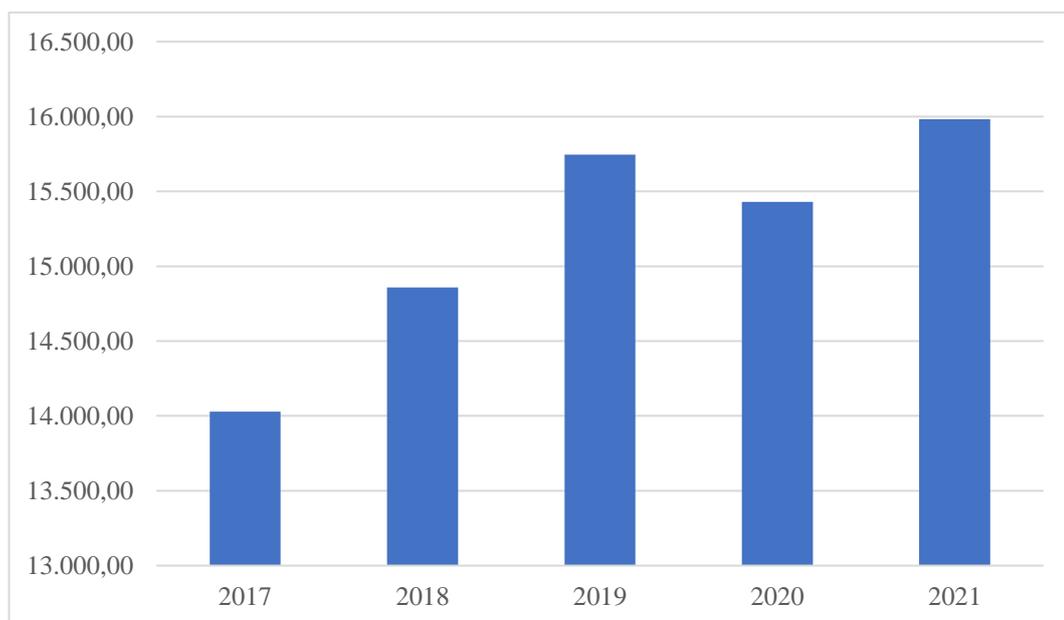
Bank perkreditan rakyat (BPR) identik sebagai bank yang melayani pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang lokasinya tidak jauh dari jangkauan BPR. Selain memberikan andil cukup besar bagi perekonomian nasional, BPR memiliki kedudukan penting dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini disebabkan karena BPR yang berfokus pada usaha mikro dan kecil banyak melibatkan masyarakat miskin maupun masyarakat yang kehidupannya dekat dengan kemiskinan (Akyuwen et al., 2010) dalam Rizkiyah & Nuryati (2020).

Selain penyaluran BPR, yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu Produk domestik regional bruto (PDRB). Menurut Hadi Sasana (2006) dalam Swendra et al., (2016), salah satu indikator tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah tingkat produk domestik regional bruto (PDRB) yang merupakan nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode.

Semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin besar potensi sumber penerimaan daerah tersebut. PDRB mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja. Apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai output dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah akan meningkat. Dengan

meningkatnya jumlah output maka akan menyebabkan peningkatan terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja yang diminta sehingga jumlah pengangguran menurun dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS), mengatakan PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun.



Gambar 1. 3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kota Tasikmalaya 2017-2021 (Miliar Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan gambar 1.3 dapat dilihat bahwa PDRB di Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun sempat menurun pada tahun 2020 sebesar 1,02 persen dengan jumlah PDRB sebesar 15.430,02 miliar rupiah. Dari sisi

produksi, pertumbuhan terendah dicapai oleh lapangan usaha jasa perusahaan sebesar 14,02 persen.

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan yaitu tingkat pengangguran. Pengangguran terbuka terjadi karena jumlah lapangan kerja relatif rendah dibandingkan jumlah angkatan kerja yang tinggi. Tingginya angka pengangguran merupakan salah satu contoh kurang berhasilnya pembangunan dalam suatu negara karena terjadi ketidakseimbangan jumlah kesempatan kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia.

Menurut Priyo (2015), variabel pengangguran menunjukkan hubungan yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, menurutnya efek dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang.

Pemerintah kota (Pemkot) Tasikmalaya mendata jumlah warga yang berstatus sebagai penganggur mengalami peningkatan. Angka pengangguran terbuka di Kota Tasikmalaya mencapai 3,5 persen dari jumlah total populasi berusia produktif. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya, Rahmat Mahmuda menilai angka pengangguran disebabkan perekonomian yang tidak memuaskan (Republika, 2018).

**Tabel 1. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Tasikmalaya
Tahun 2017-2021 (persen)**

| Tahun | Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) |
|-------|--|
| 2017 | 6,89 |
| 2018 | 6,89 |
| 2019 | 6,78 |
| 2020 | 7,99 |
| 2021 | 7,66 |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Kota Tasikmalaya pada tahun 2017 sebesar 6,89 persen. Data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 jumlah penduduk yang menganggur di Kota Tasikmalaya sebanyak 21.478 jiwa. Sebanyak 15.394 jiwa penganggur laki-laki dan 6.084 jiwa jumlah pengangguran perempuan. Semakin tingginya tingkat pengangguran maka akan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Salah satu cara untuk mengurangi tingkat pengangguran yaitu dengan cara menciptakan lapangan kerja.

Teori mengatakan bahwa penyaluran kredit BPR, PDRB, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan saling berpengaruh. Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menguji sejauh mana **“Pengaruh Penyaluran Kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Tasikmalaya Tahun 2010-2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penyaluran kredit BPR, PDRB, dan tingkat pengangguran terbuka secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Kota Tasikmalaya periode 2011-2021?
2. Bagaimana pengaruh penyaluran kredit BPR, PDRB, dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Kota Tasikmalaya periode 2011-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian hendak dicapai:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penyaluran kredit BPR, PDRB, dan tingkat pengangguran terbuka secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Kota Tasikmalaya periode 2011-2021.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penyaluran kredit BPR, PDRB, dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Kota Tasikmalaya periode 2011-2021.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Adapun kegunaan hasil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, memberikan tambahan wawasan bagi penulis mengenai penyaluran kredit BPR, PDRB, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Kota Tasikmalaya.
2. Bagi mahasiswa, diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu menambah wawasan mahasiswa. Mengenai penyaluran BPR, PDRB, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Selain itu dapat dijadikan perbandingan penelitian selanjutnya.
3. Bagi Universitas, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan informasi bagi lingkungan akademik khususnya Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kota Tasikmalaya. Dalam hal ini, melakukan penelitian ini dengan menggunakan data sekunder.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan sejak bulan Maret 2022 bulan Oktober 2022 dengan detail sebagai berikut:

